ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DITINJAU DARI RASIO KEUANGAN KOTA PEKANBARU

ZAKKY HAIKAL ASSEGAF¹

Universitas Muhammadiyah

e-mail: 190301148@student.umri.ac.id

MUHAMMAD AHYARUDDIN²

Universitas Muhammadiyah

EVI MARLINA³

Universitas Muhammadiyah

Email: evimarlina@umri.ac.id

ABSTRACT

Local Own-Source Revenue (PAD) is one of the main sources of funding for regional expenditures. The decline in PAD and government performance significantly impacts the financial performance of the Pekanbaru City Government. This study aims to examine the financial performance of the Pekanbaru City Government as assessed by fiscal decentralization ratio, regional independence, efficiency, effectiveness, and harmony ratios. The financial ratios used in this study include the fiscal decentralization ratio, regional dependency ratio, efficiency ratio, effectiveness ratio, and harmony ratio. The data utilized in this research comprise primary data obtained through interviews and secondary data in the form of the financial statements of the Pekanbaru City Government. The study employs the interactive data analysis method by Miles & Huberman. The results indicate that the financial performance of the Pekanbaru City Government, as measured by the fiscal decentralization ratio, tends to be fairly good, while efficiency is classified as highly efficient. However, the effectiveness ratio indicates ineffective financial performance, and the calculation of the independence ratio shows that Pekanbaru's level of dependency is relatively low or consultative. Furthermore, operational expenditures dominate over capital expenditures, which hinders the provision of infrastructure and facilities that support the improvement of public welfare and services in Pekanbaru City.

Keywords: *Fiscal Decentralization, Regional Independence, Efficiency, Effectiveness, Harmony, Financial Performance*

ABSTRAK

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan belanja daerah. Penurunan PAD dan kinerja pemerintah ini tentunya sangat berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kota Pekanbaru ditinjau dari rasio desentralisasi fiskal, kemandirian daerah, efisiensi, efektivitas dan keserasian. Rasio keuangan yang digunakan dipenelitian ini antara lain, rasio desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan daerah, rasio efisiensi, rasio efektivitas, dan rasio keserasian. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode analisis data interaktif Miles&Huberman. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kota Pekanbaru menurut desentralisasi fiskal cenderung cukup bagus, efisiensi tergolong sangat efisien, sedangkan menurut rasio efektivitas menunjukkan kinerja yang tidak efektif, dan perhitungan rasio kemandirian menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pekanbaru terindikasi rendah atau konsultatif. Untuk porsi belanja operasi lebih dominan dibandingkan dengan porsi belanja modal sehingga dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru dan pelayanan public menjadi terhambat.

Kata Kunci: *Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Daerah, Efisiensi, Efektivitas, Keserasian, Kinerja Keuangan*

1. PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), visi, misi, dan program kepala daerah terpilih dijadikan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). RENSTRA adalah komponen dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Menurut Renstra BPKAD Kota Pekanbaru tahun 2023-2026, isu utama yang dihadapi adalah rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan manajemen keuangan yang tidak efisien. Namun, saat ini, fokus utama akan ditujukan untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui penggunaan strategi dan rencana yang telah dikembangkan sebelumnya, dengan harapan dapat meningkatkan PAD dan memperbaiki manajemen keuangan.

Implementasi PAD setiap tahun menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempromosikan pembangunan ekonomi lokal, yang tidak hanya bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Dengan adanya kemandirian keuangan dan peningkatan PAD, jelas bahwa pemerintah, terutama pemerintah daerah, mampu memberikan layanan keuangan yang optimal. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber

daya untuk memberikan manfaat, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu, dibutuhkan alat yang bisa mengukur kemampuan keuangan pemerintah dalam waktu tertentu, sehingga masyarakat serta pemerintah pusat dapat mengetahui apakah pengelolaan keuangan tersebut berjalan baik atau tidak. Maka dari itu, analisa rasio adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja keuangan dengan memanfaatkan laporan keuangan sebagai sumber utama melakukan perhitungan.

Terdapat berbagai jenis rasio keuangan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja keuangan, namun penggunaannya harus didasarkan pada pertimbangan yang cermat terhadap situasi dan informasi yang tersedia. Hasil dari analisis rasio tersebut berfungsi untuk menjelaskan atau menggambarkan kondisi keuangan yang terjadi berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Temuan ini selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi kualitas layanan publik di masa mendatang, guna meningkatkan kepuasan masyarakat Kota Pekanbaru.

Meskipun berbagai tantangan dihadapi, penting bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk memiliki metode yang andal dalam mengelola dan meningkatkan pendapatan daerah. Rasio keuangan merupakan salah satu alat yang dapat memberikan informasi keuangan secara jelas, transparan, dan tidak menimbulkan ambiguitas, sebagai bentuk akuntabilitas dalam pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap penggunaan rasio keuangan daerah sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja BPKAD Kota Pekanbaru pada periode 2018 hingga 2023..

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan, yang muncul dari beberapa bidang seperti ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi, menjelaskan hubungan antara dua entitas, yaitu prinsipal dan agen. Teori ini menjelaskan struktur sebuah bisnis antara individu, kelompok, atau organisasi, dimana satu pihak (prinsipal) membuat kontrak, baik secara diam-diam atau tidak, dengan pihak lain (agen) agar agen dapat melaksanakan tugas sesuai dengan keinginan prinsipal, seperti dalam bidang tugas dan wewenang. Delegasi terjadi ketika seorang atau sekelompok orang (prinsipal) mengalihkan tanggung jawab kepada orang atau sekelompok orang lain (agen) untuk menentukan tingkat kebutuhan prinsipal.

Salah satu fungsi utama pemerintah sebagai agen adalah untuk menetapkan kebijakan dan strategi sehingga dapat memberikan layanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat umum sebagai individu dengan tingkat kemampuan tertinggi. Namun, berdasarkan teori ketidakmungkinan, sangat sulit menyajikan informasi yang dapat memenuhi kepentingan semua pihak sekaligus. Laporan keuangan yang baik menjadi penanda kesuksesan dalam kinerja pemerintah sesuai harapan prinsipal. Strategi yang digunakan pemerintah akan memengaruhi hasil laporan keuangan serta kualitas pelayanan yang diberikan. Jadi, meskipun ada tantangan, peluang untuk mencapai hasil yang baik tetap terbuka. Jika argumen "tidak ada bukti" bukanlah bukti "tidak ada", maka kepercayaan masyarakat tetap bisa tumbuh. Oleh karena itu, sistem pengawasan pemerintah yang efektif dan komprehensif diperlukan. Selain itu, rencana kegiatan dan anggaran harus diungkapkan seperti peraturan keuangan yang berlaku, agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi harapan masyarakat.

2.2 Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan dibuat untuk menunjukkan kondisi dan hasil keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu dan membantu pengguna laporan dalam membuat keputusan tentang kegiatan ekonomi. Tiga bagian besar ekonomi Indonesia terdiri dari sektor nirlaba, sektor publik, dan sektor swasta. Khusus pada sektor publik, diketahui terdapat dua entitas terpisah, yaitu entitas akuntansi dan entitas pelapor. Dalam konteks akuntansi pemerintahan, entitas akuntansi merupakan elemen pemerintah yang mengawasi anggaran, aset dan kewajiban, mengadakan pembukuan serta menyediakan laporan keuangan berdasarkan akuntansi yang diterapkan. Adapun elemen pemerintah yang diisi oleh satu atau lebih Entitas akuntansi berdasarkan undang-undang wajib mengeluarkan laporan pertanggungjawaban menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan kepada entitas pelaporan, yang disebut entitas pelaporan.

Laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL), laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan adalah semua bagian dari laporan keuangan tersebut. Secara utama, laporan keuangan pemerintah daerah memberikan ringkasan hasil pengelolaan keuangan daerah selama periode waktu tertentu. Keuangan daerah secara umum mencakup semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat diukur dalam bentuk uang, serta segala sesuatu yang menjadi milik daerah dan berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2.3 Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Analisis keuangan adalah proses mengevaluasi berbagai jenis informasi yang tercantum dalam laporan keuangan. Analisis keuangan bisnis dan pemerintahan memiliki perbedaan signifikan, yang tergantung pada objek yang dianalisis. Saat melakukan analisis keuangan, beberapa faktor harus dipertimbangkan. Rasio adalah unit pengukuran yang umum digunakan untuk menentukan hubungan atau keseimbangan antara satu kuantitas dan kuantitas lainnya. Penggunaan analisis rasio keuangan di pemerintahan sangat luas, sehingga tidak ada peraturan spesifik yang mengatur nama dan metode pelaksanaannya.

Teknik yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menganalisis rasio keuangan adalah dengan membandingkan hasil yang diperoleh selama suatu periode dengan

periode sebelumnya, sehingga dapat memahami perkembangan tiap tahunnya. Rasio yang dapat digunakan dalam analisis data keuangan APBD adalah rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas pendapatan daerah (PAD), rasio efisiensi PAD, rasio kemandirian daerah, dan rasio keserasian.

2.4 Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi fiskal adalah rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD yang diukur dengan membandingkan antara PAD dengan total pendapatan APBD (Marlianita & Saleh, 2020). Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Penerimaan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi (Anggi, 2022). Desentralisasi fiskal adalah kemampuan keuangan daerah dan wewenang untuk mengumpulkan dan mengatur pendapatan untuk kepentingan pemerintahan. Sebuah rumus dapat digunakan untuk menghitung derajat desentralisasi:

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari rasio yang dibagi menjadi beberapa kelas interval sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Rasio Desentralisasi Fiskal

RDF	Kemampuan Keuangan
0-10	Sangat Kurang
10,01-20	Kurang
20,01-30	Cukup
30,01-40	Sedang
40,01-50	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber : Karina & Wibowo (2022)

2.5 Rasio Efisiensi PAD

Rasio efisiensi menentukan perbedaan antara jumlah uang yang dihabiskan untuk memperoleh suatu hasil dan jumlah uang yang diperoleh. Operasi pemerintah daerah menjadi lebih efisien ketika rasio berada pada 100%. Oleh karena itu, perlu untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang biaya yang terlibat dalam proses penerimaan pembayaran, agar dapat ditentukan apakah proses pengumpulan pembayaran tersebut efisien atau tidak. Keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatannya akan terhambat jika biaya pengumpulan pendapatan lebih tinggi daripada jumlah yang berhasil dikumpulkan. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung rasio efisiensi adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}$$

Ukuran dari rasio efisiensi dikelompokkan ke dalam beberapa klasifikasi sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.2 Rasio Efisiensi PAD

Kriteria Efisiensi	Persentase Kinerja Keuangan
Tidak Efisien	>100%
Kurang Efisien	90%-100%
Cukup Efisien	80%-90%
Efisien	60%-80%
Sangat Efisien	<60%

Sumber : Karina & Wibowo (2022)

2.6 Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan, kemudian dibandingkan dengan target yang telah disetujui berdasarkan potensi nyata daerah tersebut. Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang ditetapkan. Kapabilitas daerah dapat dianggap efektif jika rasio efektivitas yang dicapai meraih 100%. Kemampuan daerah dalam mencapai target yang ditentukan akan semakin baik jika nilai rasio efektivitasnya semakin tinggi. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung rasio efektivitas adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Berikut merupakan kategori rasio efektivitas PAD:

Tabel 2.3 Rasio Efektivitas PAD

Efektivitas Keuangan	Rasio Efektivitas PAD (%)
Tidak Efektif	<100%
Efektif Berimbang	=100%
Efektif	>100%

Sumber : Karina & Wibowo (2022)

2.7 Rasio Kemandirian Daerah

Membandingkan PAD dengan total pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, seperti bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi serta pinjaman dari luar daerah, menunjukkan rasio kemandirian daerah. Rasio kemandirian daerah meningkat seiring dengan pengurangan ketergantungannya pada bantuan luar, dan sebaliknya. Selain itu, rasio kemandirian menunjukkan seberapa aktif warga berkontribusi kepada pemerintah daerah dengan membayar pajak dan retribusi. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, semakin baik kesejahteraan masyarakat. Metode untuk menghitung rasio kemandirian adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Transfer pusat+Provinsi+Pinjaman}}$$

Berikut adalah tabel kategori rasio kemandirian daerah.

Tabel 2.4 Rasio Kemandirian Daerah

Kemampuan Daerah	Rasio	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	>75%	Delegatif

Sumber : Karina & Wibowo (2022)

2.8 Rasio Keserasian

Tidak ada tolok ukur yang menjelaskan rasio ideal antara belanja operasional dan modal terhadap belanja daerah karena sangat dipengaruhi oleh aktivitas pembangunan dan jumlah investasi yang diperlukan. Oleh karena itu, rasio keserasian menjelaskan terkait strategi pemerintah daerah dalam mementingkan alokasi dana untuk belanja operasional dan modal secara optimal. Persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin cenderung berkorelasi negatif dengan persentase belanja investasi, atau belanja pembangunan, yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat. Metode yang digunakan untuk menentukan rasio keserasian adalah:

$$\text{Rasio belanja rutin/operasi} = \frac{\text{Belanja rutin/operasi}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

$$\text{Rasio belanja modal} = \frac{\text{Belanja modal}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif yang didukung angka. Waruwu (2024) mengatakan metode kualitatif adalah proses penelitian yang mengumpulkan data deskriptif dari orang yang diamati dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan. Penelitian kualitatif dimulai dengan latar belakang ilmiah dan bertujuan untuk menafsirkan kejadian. Penelitian ini dilakukan dengan berbagai teknik modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan objek dan hasil penelitian. Menurut Harun et al. (2022), deskripsi adalah metode yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang subjek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang tepat.

Data seperti catatan laporan keuangan atau laporan historis yang tersimpan dalam arsip atau data dokumentasi yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini karena mereka diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui media perantara. Data utama penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pekanbaru. Proses pengumpulan, pengurangan, penyampaian, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah semua komponen yang terlibat dalam analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles & Huberman.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Rasio Desentralisasi Fiskal

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio desentralisasi fiskal pemerintah daerah Kota Pekanbaru adalah:

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kriteria Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi Fiskal	Kriteria
1-10%	Sangat Kurang
10-20%	Kurang
20-30%	Cukup
30-40%	Sedang
40-50%	Baik
50%>	Sangat Baik

Sumber: Karina & Wibowo (2022)

Hasil perhitungan rasio desentralisasi fiskal pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2018-2022 ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 4.2 Perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal Tahun 2018-2023

Tahun	Realisasi PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Desentralisasi Fiskal	Tingkat Desentralisasi
2018	592.707.161.811,78	2.235.018.502.739,24	26,51%	Cukup
2019	759.870.702.612,75	2.555.204.190.267,30	29,73%	Cukup
2020	618.090.322.805,90	2.339.036.234.444,86	26,42%	Cukup
2021	684.642.966.382,10	2.337.605.186.326,22	29,23%	Cukup
2022	799.021.464.425,65	2.479.247.340.045,65	32,22%	Sedang
2023	890.286.830.690,38	2.753.144.818.421,38	32,33%	Sedang

Sumber: Data Diolah, 2025

Dilihat dari hasil tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan BPKAD Kota Pekanbaru menurut perhitungan rasio desentralisasi fiskal, dapat dikategorikan cukup. Dari tahun 2018, realisasi PAD Kota Pekanbaru sebesar Rp592.707.161.811,78 atau sebesar 26,51% dari total pendapatan daerah. PAD BPKAD mengalami kenaikan pada tahun 2019 dari tahun 2018 sebesar Rp759.870.702.612,75 atau sebesar 29,73%. Selanjutnya, tahun 2020 PAD BPKAD menurun sebesar Rp618.090.322.805,90 atau sebesar 26,42%. Kemudian pada tahun 2021, PAD BPKAD mengalami peningkatan dari tahun 2020 menjadi Rp684.642.966.382,10 atau sebesar 29,23%. Selanjutnya, tahun 2022 PAD BPKAD meningkat sebesar Rp799.021.464.425,65 atau sebesar 32,22% dari tahun 2021. Dan tahun 2023, PAD BPKAD meningkat lagi sebesar Rp890.286.830.690,38 atau sebesar 32,33%. Menurut hasil desentralisasi fiskal secara keseluruhan, Kota Pekanbaru memiliki kemampuan keuangan yang cukup karena berada dalam interval 20–30 persen dan 30–40 persen. Ini menunjukkan bahwa PAD memiliki kemampuan yang cukup menuju sedang untuk membiayai pembangunan wilayah.

Hasil penelitian ini disebabkan oleh PAD Kota Pekanbaru yang sangat kecil dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Selain itu, PAD tidak memiliki peran yang signifikan dalam membiayai pembangunan wilayah Kota Pekanbaru karena kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah masih rendah. Pemerintah Kota Pekanbaru masih bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi setempat untuk membiayai operasi dan pembangunan. Diharapkan ke depan, pemerintah Kota Pekanbaru akan berusaha meningkatkan PAD dengan mencari potensi baru. Didasarkan pada uraian dan perhitungan ini, desentralisasi fiskal Kota Pekanbaru selama enam tahun tergolong sedang. Senada dengan pendapat bapak Mirza yang mengatakan:

“...Potensi pendapatan asli daerah kota saat ini sebenarnya kita bisa melihat bahwasannya PAD kota Pekanbaru itu secara realnya itu terbagi atas 2 kalau untuk PAD, yang pertama adalah pajak yang kedua adalah retribusi, nah bagaimana dengan potensi PAD yang kira-kira akan menjadi penambah pendapatan daerah yang ada di Kota Pekanbaru, secara di Pekanbaru ini kan adalah kota bisnis sebenarnya, bukan kota wisata eh ya mungkin wisatanya wisata belanja bukan pula kota atau daerah yang memiliki sumber daya alam yang tinggi, jadi memang potensi besar yang ada di kota Pekanbaru adalah dari sektor bisnis. Nah sektor bisnis kalau kita bicara terkait dengan bisnis maka yang paling besar potensinya adalah terkait dengan pendapatan asli daerah adalah dari sektor pajak, seperti pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan serta mungkin ada pajak seperti pajak film kemudian pajak reklame itu mungkin yang besar daripada sisi retribusi yang ada di kota Pekanbaru, maka kalau saya bilang yang berpotensi untuk menaikkan pendapatan asli daerah itu dari sektor pajaknya. Tak menutup kemungkinan dari sektor retribusi, tapi yang paling besar adalah dari sektor pajak. karena daerah kota Pekanbaru adalah sebagai kota yang lebih banyak dari sisi bisnisnya daripada kekayaan alam ataupun potensi wisata.”

4.2 Rasio Efisiensi PAD

Rumus yang digunakan dalam menghitung rasio efisiensi PAD Kota Pekanbaru adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD (5\%) dari Anggaran}}{\text{Realisasi PAD}}$$

Untuk menilai efisiensi atau tidaknya, tabel kriteria pengukuran efisiensi berikut dapat digunakan:

Tabel 4.3 Kriteria Pengukuran Efisiensi

Kriteria Efisiensi	Persentase Kinerja Keuangan
Sangat Efisien	<10
Efisien	11-20%
Cukup Efisien	21-30%
Kurang Efisien	31-40%
Tidak Efisien	>40%

Sumber: Karina & Wibowo (2022)

Berikut hasil perhitungan rasio efisiensi PAD pemerintah daerah Kota Pekanbaru tahun 2018-2023 yang ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Efisiensi PAD Tahun 2018-2023

Tahun	Biaya Pemungutan PAD (5%) dari Anggaran	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Efisiensi	Tingkat Efisiensi
2018	54.277.790.929,4	592.707.161.811,78	9,15%	Sangat Efisien
2019	48.189.203.830,7	759.870.702.612,75	6,34%	Sangat Efisien
2020	56.323.834.635,05	618.090.322.805,90	9,11%	Sangat Efisien
2021	50.768.555.994,75	684.642.966.382,10	7,41%	Sangat Efisien
2022	42.005.403.150,95	799.021.464.425,65	5,25%	Sangat Efisien
2023	50.906.152.121,35	890.286.830.690,38	5,71%	Sangat Efisien

Sumber: Data Diolah, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa daerah Kota Pekanbaru memiliki tingkat efisiensi atau efisiensi yang cukup baik setiap tahunnya. Ini disebabkan oleh perencanaan anggaran yang sangat efisien yang dilakukan oleh pemerintah kota, yang juga memanfaatkan pajak dan retribusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran, yang menghasilkan peningkatan target PAD daerah setiap tahunnya. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Ipul:

“...Terkait dengan pemungutan pajak, sebenarnya memang penerimaan PAD potensi sangat besar dari pemungutan pajak baik pajak daerah maupun retribusi daerah namun ada ketidak efesienan dalam pemungutan pajak terlebih dari pajak retribusi karena masih banyak masyarakat yang tidak tahu maupun kurang memahami dan paham secara baik atau benar yang memiliki bisnis seperti bisnis makanan, jasa-jasa terkait pajak dan retribusi...”

Semakin rendah rasio efisiensi dan persentase yang dicapai di bawah 100%, semakin baik kemampuan daerah untuk pertumbuhan pemerintah daerah Kota Pekanbaru. Dari data yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Pekanbaru sangat efisien, meskipun peningkatan dan penurunan tingkat efisiensi yang diberikan untuk mencapai PAD masih kurang maksimal.

4.3 Rasio Efektivitas PAD

Rumus yang digunakan dalam menghitung rasio efektivitas keuangan Kota Pekanbaru adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 4.5 Kriteria Pengukuran Efektivitas

Efektivitas Keuangan	Rasio Efektivitas PAD (%)
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90-99%	Cukup Efektif
75-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Karina & Wibowo (2022)

Hasil perhitungan rasio efektivitas perolehan pendapatan asli daerah pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2018-2023 ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 4.6 Perhitungan Rasio Efektivitas Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2018-2023

Tahun	Realisasi PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas	%Naik/Turun	Tingkat Efektif
2018	592.707.161.811,78	1.085.555.818.588	54,59%	-	Tidak Efektif
2019	759.870.702.612,75	963.784.076.614	78,84%	24,25%	Kurang Efektif
2020	618.090.322.805,90	1.126.476.692.701	54,86%	(23,98%)	Tidak Efektif
2021	684.642.966.382,10	1.015.371.119.895	67,42%	12,56%	Tidak Efektif
2022	799.021.464.425,65	840.108.063.019	95,1%	27,68%	Cukup Efektif
2023	890.286.830.690,38	1.018.123.042.427	87,44%	(7,66%)	Kurang Efektif
Rata-Rata			73,041%		Tidak Efektif

Sumber: Data Diolah, 2025

Jumlah pencapaian diatas dapat memberitahukan bahwa pemerintah daerah Kota Pekanbaru masih kurang efektif dalam mengelola PAD daerah dari 2018 hingga 2023, meskipun pada tahun 2022 tingkat efektivitas telah meningkat menjadi 95,1%. Hal ini menunjukkan bahwa, karena ketergantungan dan kemandirian anggaran yang tinggi, pengelolaan pemerintah daerah di daerah Pekanbaru masih mengalami penilaian yang buruk dalam hal perencanaan anggaran. Selaras dengan perkataan pak Mirza didalam wawancara yang menyebutkan bahwa:

“Pajak yang tidak tercapai atau paling banyak maksimal itu diangka 80% sampai dengan 90% dari potensi pendapatan asli daerah baik dari sisi pajak maupun dari sisi retribusi. Nah realisasi yang tidak tercapai dengan target yang sudah ditetapkan dengan kondisi adanya otonomi daerah Ini sebenarnya membuka banyak peluang bagi daerah untuk bisa memanfaatkan potensi dari pendapatan asli daerahnya sendiri Namun untuk mencapai PAD dari sisi pajak dan retribusi itu bukan hal yang mudah dilaksanakan Karena memang banyak hal kalau kita bicara terkait dengan sisi bisnis yang ada di Kota Pekanbaru kita akan bicara bagaimana infrastrukur itu diciptakan untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru.”

4.4 Rasio Kemandirian Daerah

Rumus yang digunakan dalam menghitung rasio kemandirian daerah Kota Pekanbaru adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Transfer pusat+Provinsi+Pinjaman}}$$

Hasil perhitungan rasio kemandirian daerah Kota Pekanbaru tahun 2018-2023 ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 4.7 Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2018-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Bantuan Pusat dan Pinjaman	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan	Kemampuan
2018	592.707.161.811,78	1.612.311.340.927,16	36,56%	Konsultatif	Rendah
2019	710.129.196.650,75	1.559.911.518.142,17	43,9%	Konsultatif	Rendah
2020	618.090.322.805,90	1.600.701.692.237,96	37,71%	Konsultatif	Rendah
2021	684.642.966.382,18	1.549.702.968.074,04	41,41%	Konsultatif	Rendah
2022	799.021.464.425,65	1.680.225.885.620	47,55%	Konsultatif	Rendah
2023	890.286.830.690,38	1.862.857.987.731	47,79%	Konsultatif	Rendah
	Rata-Rata		42,48%	Konsultatif	Rendah

Sumber: Data Diolah, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa kemandirian Kota Pekanbaru rata-rata berada di antara 25 dan 50% dari tahun 2018 hingga 2023, menunjukkan kemampuan daerah yang rendah. Sumbangan pemerintah pusat yang paling penting adalah dana perimbangan, yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Di sisi lain, pendapatan pajak, pendapatan retribusi, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan PAD lainnya dimiliki oleh daerah.

Menurut pola hubungan konsultatif, intervensi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah secara bertahap berkurang. Pemerintah federal hanya melakukan konsultasi karena pemerintah daerah Kota Pekanbaru lebih mampu menjalankan otonomi daerahnya. Dilihat dari enam tahun terakhir, rasio kemandirian Kota Pekanbaru rata-rata 42,48%, yang masih di bawah rata-rata. Ini didasarkan pada pola konsultatif, dimana dana tranasfer cenderung lebih besar daripada PAD Kota Pekanbaru sendiri, dan ketergantungan dana untuk operasional daerah tidak terlalu bergantung pada besaran APBN. Hasil analisis bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi masih memberikan kontribusi keuangan yang signifikan kepada pemerintah daerah Kota Pekanbaru seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Pendapatan Transfer Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2018-2023

Tahun	Total Pendapatan Transfer		%
	Anggaran	Realisasi	
2018	1.461.058.822.285	1.545.855.460.927	105,81%
2019	1.651.264.273.331	1.559.911.518.142	94,47%
2020	1.561.653.270.764	1.600.701.692.237	102,5%
2021	1.518.094.156.764	1.549.702.968.074	102,08%
2022	1.651.901.204.829	1.680.225.855.620	101,71%
2023	1.899.849.290.220	1.862.857.987.731	98,05%

Sumber: Data Diolah, 2025

Pada tahun 2019 dan 2023, bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi rata-rata mencapai 100%, dan pada tahun 2018, 2020, 2021, dan 2022, rata-rata mencapai lebih dari 100%. Ini menunjukkan bahwa bantuan atau sumbangan dari pemerintah pusat dan provinsi masih sangat besar dalam struktur penerimaan pemerintah daerah Kota Pekanbaru. Selain itu, untuk membayar pajak dan retribusi daerah, masyarakat Kota Pekanbaru kurang terlibat dalam pembangunan daerahnya. Pemerintah Kota Pekanbaru harus lebih baik dalam mengelola PAD dan lebih aktif lagi dalam mengelola sumber pendapatan lainnya. Selain itu, pemerintah Kota Pekanbaru harus meningkatkan sumber daya alam dan sumber daya manusianya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah. Selaras dengan pernyataan Pak Mirza, yang menyatakan:

“...saat ini harusnya sudah bisa memanfaatkan secara maksimal potensi yang ada di daerah. Namun kita tidak gampang untuk mencapai target yang sudah ditetapkan karena pasti banyak unsur yang akan menyulitkan kita di lapangan dalam melaksanakan kegiatan pemungutan pajak ataupun retribusi salah satunya mungkin bisa jadi kita belum efektif mendatangi seluruh mereka yang wajib pajak ataupun wajib retribusi. Pertama bisa jadi kita belum punya datanya yang kedua atau masyarakat sendiri tidak melaporkan kepada kita si wajib pajak ataupun wajib retribusi tadi segala macam bentuk usahanya akhirnya kita tidak maksimal dalam memungut pajak ataupun retribusi yang ada di daerah”

4.5 Rasio Kecerasingan

1. Rasio Belanja Operasi

Anggaran daerah untuk kegiatan sehari-hari yang memberikan keuntungan jangka pendek, seperti belanja pegawai, barang dan jasa, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan lainnya dikenal sebagai belanja operasi. Untuk menghitung rasio belanja operasi Kota Pekanbaru, rumus berikut digunakan:

$$\text{Rasio belanja rutin/operasi} = \frac{\text{Belanja rutin/operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Hasil perhitungan rasio kecerasingan keuangan belanja operasional pemerintah daerah Kota Pekanbaru tahun 2018-2022 ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 4.9 Perhitungan Rasio Belanja Operasi Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2028-2023

Tahun	Total Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Operasi
2018	1.689.047.575.602,52	2.220.359.504.219,61	76,07%
2019	1.834.291.017.148,58	2.365.257.960.184,75	77,55%
2020	1.883.129.143.266,01	2.341.181.180.839,74	80,43%
2021	1.884.629.712.698,26	2.318.795.888.378,26	81,27%
2022	2.163.366.634.652,36	2.492.665.952.346,35	86,78%
2023	2.432.229.639.203,5	2.748.789.260.184,38	88,48%

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan informasi yang diproses, dapat disimpulkan bahwa data yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Pekanbaru masih digunakan secara signifikan untuk kebutuhan operasional atau rutin dibandingkan kebutuhan modal atau konstruksi. Hasil operasional mencakup pegawai, barang dan jasa, bunga, hibah, bantuan sosial, serta hasil partai politik, provinsi, dan kabupaten. Berdasarkan statistik ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Pekanbaru memprioritaskan belanja operasional lebih dari belanja modal dari tahun 2018 hingga 2023. Ini karena pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang melanda Indonesia, termasuk Kota Pekanbaru, yang memaksa seluruh kegiatan atau aktifitas diluar ruangan menjadi tidak mungkin untuk dilakukan untuk mencegah penyebaran virus. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kota Pekanbaru melakukan *refocusing* anggaran untuk menekan dan mengurangi penyebaran virus. Hal ini senada dengan pernyataan pak Ipul yang mengatakan:

“Pada tahun 2020, kita ketahui bersama kita waktu itu mengalami bencana nasional bahkan internasional yaitu pandemi COVID-19. Jadi banyak objek pajak, subjek pajak dan wajib pajak yang tidak membayarkan pajak karena kesulitan ekonomi. Bagaimana mereka menghasilkan, kalau aktivitas di luar sana saja tidak sangat dibatasi waktu itu. Apalagi pedagang-pedagang, penjual barang maupun jasa yang terambat semua pada masa itu. Bahkan realisasi PAD kita saja cuma menyentuh angka 58% dari anggaran. Di tahun 2019 saja realisasi PAD menyentuh angka 74% dari anggaran. Dan pada waktu itu ada kita refocusing untuk anggaran. Refocusing itu hasilnya kita belanjakan untuk penanganan COVID-19”

4.6 Rasio Belanja Modal

Belanja modal biasanya merupakan biaya untuk membeli aset tetap dan aset lainnya yang memiliki manfaat selama lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mendapatkan tanah, struktur, peralatan, dan aset tak berwujud lainnya. Belanja modal digunakan secara signifikan untuk membangun jalan, jaringan dan irigasi, gedung dan bangunan, serta peralatan dan mesin. Namun, pengeluaran untuk membeli aset tetap tanah, aset tetap lainnya, dan aset lainnya lebih sedikit. Ini karena Kota Pekanbaru masih membutuhkan pembangunan untuk kepentingan umum sosial kemasyarakatan, bukan untuk keuntungan pribadi. Sebagai suatu perhitungan modal daerah berikut rumus yang digunakan dalam perhitungan rasio belanja modal Kota Pekanbaru adalah:

$$\text{Rasio belanja modal} = \frac{\text{Belanja modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Tabel 4.10 Perhitungan Rasio Belanja Modal Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2018-2023

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Modal
2018	531.148.865.175,09	2.220.359.504.219,61	23,76%
2019	529.533.719.916,67	2.240.046.257.971,36	20,72%
2020	396.136.063.968,73	2.252.225.172.476,47	16,93%
2021	415.994.763.452,07	2.318.795.888.378,26	17,79%
2022	328.335.985.976,99	2.492.665.952.346,35	13,24%
2023	315.807.494.723,88	2.748.789.260.184,38	11,48%

Sumber: Data Diolah, 2025

Perhitungan rasio keserasian Kota Pekanbaru 2018–2023 menunjukkan bahwa aliran pendapatan pemerintah daerah lebih banyak digunakan untuk biaya operasi dan rasio belanja modal rendah. Singkatnya, sebagai kota yang sedang berkembang, pemerintah Kota Pekanbaru harus meningkatkan pengeluaran modal dan pembangunan dan mengurangi pengeluaran operasional seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melalui tahap beberapa tahap yang telah dilakukan yaitu pengumpulan data, pengelolaan data, dan analisis data didapatkan hasil analisis terkait kinerja keuangan pemerintah Kota Pekanbaru ditinjau dari rasio desentralisasi fiskal, efisiensi PAD, efektivitas PAD, kemandirian daerah dan keserasian. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jika dilihat dari aspek rasio kemandirian keuangan, kinerja pemerintah daerah Kota Pekanbaru belum cukup mandiri untuk memenuhi kebutuhan dana untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Pada tahun 2018, 2020, 2021, dan 2023, pendapatan transfer melebihi 100% dari anggaran. Ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kota Pekanbaru belum cukup mandiri untuk memenuhi kebutuhan dana untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah.

2. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Pekanbaru tidak efektif jika dilihat dari rasio efektivitas. Tingkat efektivitas mengalami naik turun setiap tahun. Ini karena perencanaan anggaran yang buruk, yang berarti anggaran lebih banyak bergantung pada transfer pemerintah pusat daripada PAD sendiri.
3. Karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru relatif kecil dibandingkan dengan total pendapatan daerah secara keseluruhan, maka kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dinilai cukup jika dilihat dari rasio desentralisasi fiskal. Selain itu, PAD belum memiliki peran yang signifikan dalam membiayai pembangunan wilayah Kota Pekanbaru, mengingat partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta retribusi daerah masih rendah. Untuk membiayai operasional dan pembangunan daerah, Pemerintah Kota Pekanbaru masih sangat bergantung pada dukungan dana dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
4. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Pekanbaru tergolong cukup efisien jika dilihat dari rasio efisiensi, dengan tingkat efisiensi dari tahun 2018 hingga 2023 di bawah 10%. Ini disebabkan oleh perencanaan anggaran yang sangat efisien pemerintah daerah Kota Pekanbaru yang memanfaatkan pajak dan retribusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat daerah setempat, sehingga target penerapannya.
5. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Pekanbaru jika dilihat dari aspek rasio keserasian dapat dikatakan bahwa besar dana yang dimiliki pemerintah Kota Pekanbaru masih lebih dominan digunakan untuk kebutuhan belanja operasi. Demikian pula rasio belanja modal cenderung relatif kecil. Sebagai negara berkembang, pemerintah Kota Pekanbaru seharusnya meningkatkan belanja modal dan pembangunan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Selain itu, mereka harus menekankan belanja rutin seperti belanja pegawai dan barang/jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggi, A. A. S. (2022). Analisis Rasio Keuangan APBD untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kota Medan Tahun 2016-2020. *Akuntansi Prima*, 4(1), 104–115. <https://doi.org/10.34012/japri.v4i1.2614>
- Harun, A., Triyadi, S., & Muhtarom, I. (2022). Analisis Nilai-Nilai Sosial dalam Novel Ancika Karya Pidi Baiq (Tinjauan Sosiologi Sastra). *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, 8(2), 466–474. <https://doi.org/10.30605/onoma.v8i2.1778>
- Karina, N. N., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Eksposisi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi*, 14(2), 146–166. <https://doi.org/10.35313/eksposisi.v14i2.4512>
- Marlianita, Y., & Saleh, S. A. (2020). Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 25–35. <https://jurnal-akuntansi.polban.ac.id/>
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>